

PERKEMBANGAN STATUS DAN PERANAN WANITA INDONESIA

Dra. HADRIANA MARHAENI MUNTHE

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara

I. Secara biologis wanita dan pria memang tidak sama, akan tetapi sebagai makhluk jasmani dan rohani yang diperlengkapi dengan akan budi dan kehendak merdeka, kedua macam insan itu mempunyai persamaan yang hakiki. Keduanya adalah pribadi yang mempunyai hak sama untuk berkembang. Namun dalam kenyataannya, baik di negara maju maupun di negara berkembang, wanita dianggap sebagai warga negara kelas dua II, yang selalu mengalami kesulitan untuk dapat menikmati hak yang dimilikinya.

Jawaban untuk pertanyaan sejak kapan wanita dikategorikan sebagai "kelamin kedua II" yang berada di bawah subordinasi pria, antara lain dapat dicari pada pelacakan kaum arkeolog yang meneliti kehidupan dan kebudayaan penduduk pada zaman pra-sejarah. Di antara hasil penelitian zaman paleolitikum, sebuah periode yang sangat panjang dan berakhir pada sekitar tahun 12.000 S.M., penduduknya adalah pengumpul pangan dan pemburu hewan serta ikan (Lucas, 1953). Mengingat mata pencaharian utamanya sebagai pemburu (hunter), maka Washburn dan Lancaster (1968) memunculkan konsep Man the Hunter yang menunjukkan bahwa hanya pria saja yang melakukan pekerjaan berburu. Akibatnya banyak antropolog mengartikan istilah man (= manusia) sinonim dengan male (= laki-laki). Dalam hal ini berburu tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, melainkan sebagai keseluruhan pola aktivitas kehidupan kaum pria (Reiter, 1975).

Selanjutnya untuk mendukung argumen bahwa berburu itu penting bagi kaum pria, Washburn dan Lancaster (1968) mengingatkan bahwa kaum laki-laki pada zaman modern pun mempunyai arti ekonomis. Berburu digambarkan sebagai kegiatan laki-laki untuk dibedakan dari wanita. Konsep Man the Hunter itu akhirnya menggiring kita pada kesimpulan bahwa kaum laki-laki memiliki postur tubuh yang kekar dan kuat, rasional, dan bersifat agresif, sehingga mampu berburu hewan liar secara kasar dan membunuhnya. Kiranya dapat disebutkan bahwa domination rape merupakan kejahatan perkosaan oleh kaum pria dikarenakan ingin menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai laki-laki terhadap wanita dengan tujuan akhir penaklukan sebagai seksual. Sebaliknya wanita dianggap sebagai kaum yang lemah, emosional, memerlukan perlindungan, kurang inisiatif, kurang dinamis, lebih pasif dan lebih submitif daripada pria.

Sebagai pemburu, kaum laki-laki mendapatkan kemajuan kultural yang jauh lebih banyak daripada yang diperoleh kaum wanita. Hal ini dikaitkan dengan cara mereka berburu secara kelompok ke tempat-tempat yang cukup jauh. Agar supaya usaha mereka itu berhasil baik, maka mereka belajar bekerjasama, mengembangkan teknik berburu dengan menciptakan alat-alat baru dan senjata, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan berorganisasi. Mereka juga mulai menggunakan bahasa dan menghasilkan benda-benda kesenian, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Menurut Gough, seorang antropolog, pada waktu itu telah

berbentuk keluarga. Wanita dan anak-anak tidak ikut berburu dan mereka tinggal di tempat kediamannya, mencari dan mengumpulkan makanan dari tempat yang tidak berjauhan. Hidup mereka sedikit banyak tergantung pada laki-laki pemburu yang datang dengan membawa basil buruannya yang kaya protein (Reiter, 1975).

Sebuah revolusi terjadi pada sekitar tahun 6.000 S.M. dan mulailah zaman neolitikum, atau zaman baru. Mata pencaharian sebagai pengumpul pangan dan berburu hewan serta ikan mulai ditinggalkan, diganti dengan cara bertanam bahan makanan dan buah-buahan serta beternak. Perubahan besar dalam kebudayaan ini tidak hanya terbatas pada bidang agraris dan peternakan saja, melainkan juga dalam kegiatan lain. Di antaranya timbulnya perdagangan, adanya penemuan-penemuan baru yang memungkinkan perluasan kehidupan ekonomi dengan membuat perahu-perahu, penemuan-penemuan roda, sehingga orang mampu membawa barang-barang berat dari jarak jauh, selanjutnya penemuan bajak yang membawa kemajuan besar dalam bidang pertanian (Lucas, 1953).

Kemajuan dalam berbagai bidang itu memantapkan pembagian kerja berdasarkan seksual, yang akarnya telah tumbuh pada zaman paleolitikum. Kaum laki-laki secara leluasa melakukan aktivitas dalam kehidupan publik, berarti peran yang dilakukan memungkinkan dirinya untuk berkembang. Sebaliknya kaum wanita semakin disibukkan oleh pekerjaan rumah tangga, menjaga dan membesarkan anak-anak, mengurus ternak, membakar roti, membuat dadih susu, keju dan mentega dari susu sapi atau kambing (Reiter, 1975). Melihat keunggulan kaum laki-laki itu, kaum wanita mulai dihindangi perasaan inferior.

Pembagian kerja berdasarkan seksual itu berlaku secara universal dan berlangsung sejak zaman pra-sejarah, melewati zaman kuno, zaman abad-abad pertengahan, zaman kapitalis-merkantilisme sampai pada zaman masyarakat industrial. Walaupun sudah hidup pada zaman maju, namun kehidupan wanita masih banyak yang berputar sekitar kehidupan rumah tangga. Pada zaman maju itu makin besar ketergantungan ekonomis kaum wanita pada pria, karena suami bekerja mendapatkan gaji yang dipakai untuk biaya seluruh kebutuhan keluarga. Sebaliknya wanita yang bekerja dalam rumah tangga tidak menghasilkan uang. Perasaan inferior pada wanita semakin bertambah dan sebab utamanya adalah faktor keterasingan yang membuat perkembangan kepribadiannya tidak terangsang.

Di kalangan para ahli filsafat pembagian kerja secara seksual itu menarik perhatiannya. Menurut Aristoteles (384-422 S.M.), seorang intelek terbesar zaman Yunani kuno yang dikenal sebagai ahli filsafat dan ilmuwan, berpendapat bahwa wanita adalah "Laki-laki yang tidak lengkap". Pendapat ini dapat dihubungkan dengan istilah *famulus* (Latin) atau *family* (Inggris), yang mula-mula berarti budak domestik. *Familia* berarti sejumlah budak yang dimiliki seorang laki-laki dewasa, termasuk di dalamnya anak-anak dan istri. Wanita digolongkan dalam kelompok yang dikuasai oleh laki-laki, karena jiwanya dianggap tidak sempurna. Oleh sebab itu dapatlah dimengerti bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Yunani kuno pada sekitar tahun 5000 S.M., kaum wanita, sama seperti yang berlaku pada anak-anak dan budak, tidak mempunyai hak memilih.

Para ahli filsafat abad XVIII dan XIX antara lain Kant (1724-1804) dan muridnya, Fichte (1762-1814), juga Schopenhauer (1788-1860) dan menganggap bahwa kaum wanita lebih lemah daripada pria, sebab itu wajar kalau tempat mereka di rumah. Mill (1806-1873), tokoh pemikir Inggris yang berhaluan liberal, mendasarkan pendapatnya pada falsafah liberal, yaitu bahwa semua orang

diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Dalam melaksanakan kebebasan mengembangkan bakat, wanita memilih rumah tangga, sedang kaum laki-laki memilih kehidupan publik atau profesi.

Montagu (1971) mengemukakan bahwa sifat-sifat psikologis dan sosial wanita membuktikan wanita lebih unggul daripada laki-laki. Selain itu terdapat fakta-fakta yang membuktikan bahwa wanita adalah organisme yang secara biologis lebih unggul, unggul dalam arti menikmati nilai kelangsungan hidup (survival) yang lebih tinggi daripada pria berkat sifat-sifat biologisnya. Fakta-fakta itu seharusnya dapat melenyapkan mitos inferioritas fisik wanita terhadap pria. Kekuatan otot tidak boleh dikacaukan dengan kekuatan komposisi dan menurut komposisinya wanita adalah kelamin yang lebih kuat (Montagu, 1971).

Tokoh lain, Freud (1856-1939), pendasar ajaran psycho-analisis, mengemukakan bahwa dunia adalah dunianya pria. Wanita diukur dengan kacamata: apa yang berlaku bagi pria dan apa yang ditentukan oleh pria. Pandangan Freud ini dikenal sebagai phallocentric, karena penekanannya pada organ kelamin pria sebagai sumber kekuasaan (Sadli, 1988).

Pemikiran teoritis di atas menunjukkan bahwa masalah wanita dalam hubungannya dengan pria mencakup dua bagian. Pertama, pemikiran yang dipengaruhi oleh pendekatan biologis (nature) yang tidak memberi pertimbangan pada unsur sosial-budaya. Ini berarti bahwa faktor-faktor luar hampir tidak berpengaruh sama sekali. Kedua, pemikiran yang dipengaruhi oleh pendekatan sosial-budaya yang mempertimbangkan peranan yang besar dari kekuatan-kekuatan luar. Kedua bagian itu merupakan kutub-kutub yang sulit dipertemukan dan merupakan sumber diskusi atau perdebatan.

Sesudah secara sepintas dikemukakan mengenai akan adanya pembagian kerja secara seksual dan beberapa pendapat para ahli pikir, maka uraian berikut ini dibatasi pada perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya dalam rumah tangga. Pembahasan mengenai hal ini tidak dapat lepas dari struktur masyarakat tempat keluarga-keluarga itu berada.

Marshall, peneliti status dan peranan wanita Skotlandia sejak abad XI sampai abad XX, membagi wanita di negeri itu menjadi dua kategori. Pertama, the passive Women yang berlangsung cukup lama dan berakhir pada tahun 1830. Kedua, the active Woman yang dimulai sejak tahun 1830 (Marshall, 1983). Pembagian Marshall ini kiranya dapat diterapkan di negara-negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang, dengan catatan bahwa awal periode the active Women itu tidak sama. Di Amerika Serikat, bangkitnya wanita untuk membela kaumnya lebih dulu dari sahabat-sahabatnya di Eropa. Gerakan Feminisme di negeri itu dengan tujuan memperjuangkan hak-hak bagi kaumnya seperti yang dinikmati oleh kaum pria, diawali dengan pekerjaan mendirikan College di New York didirikan pada tahun 1823, di Massachusset pada tahun 1837, kemudian diikuti dengan yang lain. Mula-mula College untuk anak-anak perempuan itu dicemooh oleh kaum pria yang disebutnya sebagai She College (Lucas, 1953). Di Skotlandia gerakan semacam itu dimulai pada tahun 1830, sedang di Inggris berlangsung lebih kemudian.

Inggris pada waktu pemerintahan Ratu Victoria (1837-1901) merupakan periode yang menyenangkan bagi kaum pria, karena mereka aman dalam kubu infallibilitas-nya (= sifat tidak dapat salah). Mereka sangat pasti terhadap

superioritas jenis kelaminnya dan inferioritas kaum wanita. Sebagai ilustrasi dapat disertakan disini bahwa Ratu Victoria pernah marah sekali terhadap siapa pun yang membaca, menulis dan menggabung pada gerakan yang memperjuangkan "Hak-hak Wanita". Ratu berpendapat bahwa Tuhan menciptakan laki-laki berbeda daripada wanita, sebab itu dibiarkan mereka tetap pada kedudukannya masing-masing (Bowman, 1954). Di negara berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia, peranan wanita baru dimulai sejak abad XX.

Pada periode Wanita Pasif, kehidupan wanita berputar disekitar kehidupan rumah tangga. Tujuan wanita seakan-akan hanyalah untuk menikah dan membangun rumah tangga, oleh karena itu anak gadis tidak sempat memiliki cita-cita. Mereka tidak mengenal masa remaja, karena sesudah berusia sekitar dua belas tahun mereka telah berumah tangga. Calon suami ditentukan oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya (Marshall, 1983; Kartini, 1979). Sesudah menikah hampir seluruh kehidupannya disibukkan oleh pekerjaan rumah tangga.

Di kalangan tingkat tinggi pola kawin muda untuk anak-anak perempuan juga sering dilakukan. Banyak diantara perkawinan itu, terutama yang berlaku pada putri-putri raja, menggunakan dasar kepentingan diplomatik yang menguntungkan bagi negerinya. Pada umumnya pria yang dimulai mencari jodohnya sangat memperhatikan faktor kekayaan, status, reputasi keluarga gadis yang akan dilamar dan juga faktor penampilan yang menarik dari gadis itu. Maksudnya agar dengan perkawinan itu kekayaan, kedudukan dan kehormatannya menjadi tambah. Akan tetapi gadis bangsawan pada umumnya juga mengajukan persyaratan bagi calon suaminya, diantaranya yang paling penting adalah kekayaan dan kedudukan. Dengan demikian perkawinan di kalangan atas dan menengah dikaitkan dengan macam-macam tujuan. perkawinan itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kedudukan sosialnya atau memindahkan kekayaan. Namun baiknya perkawinan di kalangan rakyat pada umumnya maupun golongan atas seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa perhatian ditujukan pada segi biologis wanita. Sejak kecil anak-anak perempuan telah didasarkan akan kewajibannya apabila mereka kawin dan sebagai persiapannya mereka memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga.

Perlakuan orang tua terhadap anaknya perempuan dan laki-laki tidaklah sarna. Anak gadis dididik sebagai persiapan berumah tangga, sedang anak laki-laki dikirim ke sekolah sebagai persiapan memperoleh suatu profesi. Sesudah gadis-gadis diizinkan masuk sekolah, mereka diarahkan untuk mengambil jurusan kerumah-tanggaaan atau mengurus anak-anak. Ternyata pemilihan jurusan atau mata pelajaran yang dianut merupakan cermin pandangan tradisional mengenai peranan wanita dan kaum laik-laki. Dengan demikian bidang-bidang pelajaran itu terbagi, sebagian khusus untuk pria dan sebagian lainnya untuk wanita. Pada zaman Renaissance (abad XVI) Erasmus mengarang buku pegangan mengenai sopan-santun untuk sekolah-sekolah anak laki-laki. Ini berarti bahwa yang perlu mengetahui sopan-santun, baik mengenai sikap, tingkah laku, tata cara di meja makan, maupun berbicara, hanyalah anak laki-laki (Elias, 1982). Sopan-santun dipakai sebagai bekal bergaul atau berkomunikasi, apabila mereka di kemudian hari terjun dalam masyarakat memegang suatu profesi.

Orang tua, termasuk kaum ibu yang pada umumnya menerima keunggulan pria sebagai sesuatu yang wajar, secara tidak terasa telah menanamkan sifat superioritas pria kepada anak-anaknya sejak usia dini. Hal ini tercermin pada ungkapan atau pepatah, antara lain sebagai berikut: "Anak laki-laki tidak boleh

mengangis". Berbuatlah seperti anak laki-laki". "Ia anak laki-laki yang sesungguhnya." Ungkapan terakhir itu biasanya disampaikan oleh seorang ayah yang menilai bahwa anaknya memenuhi standar sifat anak laki-laki (Bowman, 1954). Dalam bahasa Jawa terdapat ungkapan: mikul dhuwur, mendhem jero (= memikul tinggi, menanam dalam), diperuntukkan bagi anak laki-laki yang maksudnya anak laki-laki dapat mengangkat derajat orang tuanya. Sebaliknya anak perempuan disebutnya "satu mungging cangklakan (= seteru pacta ketiak), artinya anak perempuan merupakan beban berat bagi orang tuanya. Contoh lain, anak perempuan boleh bermain seperti anak laki-laki, misalnya memanjat pabon, tetapi hanya sampai waktu yang terbatas, selanjutnya ia tidak diizinkan lagi. Anak perempuan diizinkan berpakaian seperti anak laki-laki, sehingga seakan-akan tercipta mode uniseks, sedangkan laki-laki yang tidak diperkenankan memakai pakaian perempuan. Seandainya ada yang melakukan, maka hal itu dinilai tidak normal. Perikuti yang superior, sebaiknya yang kedudukannya superior dilarang mengikuti yang inferior.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa secara tidak disadari pusast pendidikan keluarga, dalam melakukan enkulturasi, ikut memperkuat kultur maskulin. Dikotomi pria-wanita tetap berlangsung, sehingga wanita selalu dibayangi oleh superioritas pria dan menyadari bahwa statusnya adalah sebagai kanca wingking (=teman di garis belakang), dan sebagai sosok yang swarga nunut, neraka katut (=kalau suami masuk sorga, istri ikut dan suami masuk neraka, istri terseret).

II. Uraian yang telah disampaikan itu menggambarkan keadaan wanita pada umumnya pada masa lampau. Wanita Indonesia dewasa ini keadaannya sudah jauh berbeda: mereka juga dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pembangunan Nasional. Wanita Indonesia, termasuk yang sudah berkeluarga, dalam kedudukannya sebagai sumberdaya manusia, diusahakan agar mendapat kesempatan untuk mewujudkan potensi-potensinya secara optimal.

Jika pada awal abad ini, mengirim anak gadisnya kesekolah dianggap menyuruh anaknya yang menempuh jalan menuju kebinasaan, seperti yang berlaku di daerah Minangkabau (Subadio, 1983), maka anak-anak perempuan dewasa ini bebas memasuki sekolah yang diinginkan. Setelah berhasil menyelesaikan studinya, di SLTA atau di perguruan Tinggi, sebagian besar dari mereka masuk angkatan kerja, memegang suatu profesi tertentu. Pemilihan profesi tidak terbatas pada profesi guru, dosen, bidan, perawat, dokter, memimpin berbagai panti asuhan, dan lainnya yang tidak jauh dari tugas ibu didalam rumah, melainkan juga telah menerobos bidang-bidang lain yang semula dimonopoli oleh kaum laki-laki. Diantaranya angkatan bersenjata, dunia bisnis modern dan jasa computer, jasa notaris, bisnis media, catering, bisnis public relations, marketing research, serta bisnis kesenian dan teater. Menduduki pimpinan tertinggi dalam universitas atau dekan fakultas dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Selanjutnya perlu dicatat partisipasi wanita dalam kegiatan politik, baik dalam badan legislatif maupun eksekutif. Diangkatnya wanita sebagai Manteri Sosial untuk beberapa kali menunjukkan bahwa untuk kedudukan tradisional wanita dianggap cocok memangku jabatan itu (Tahun, 1991).

Seperti yang dikemukakan oleh Marshall (1983), peneliti dari Skotlandia, pergantian dari periode the passive Women ke periode the active Women tidak berlangsung secara tiba-tiba, maka demikian pula dengan keadaan di Indonesia. Untuk sampai pada kemajuan wanita Indonesia abad XX sekarang ini diperlukan suatu masa transisi. Pada masa transisi itu, berarti sejak zaman penjajahan Belanda,

banyak wanita yang mendarmabaktikan dirinya dengan melakukan kegiatan sosial lewat jalur organisasi, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, Adanya keragaman daerah, antara lain mengenai agama, adat, tingkat pendidikan, dan tingkat kehidupannya, maka usaha untuk memajukan kaum wanita disesuaikan dengan keadaan setempat. Para ibu pejuang itu menyadari perlunya memperhatikan sifat kontinuitas dalam kehidupan dan budaya penduduk dan diperjuangkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergerakan wanita, merupakan pendorong paling kuat bagi terjadinya perubahan mengenai kehidupan wanita yang mencakup banyak bidang.

Di dunia Barat terdapat gerakan Feminisme, yang dapat di golongkan menjadi tiga, yakni kaum Feminis Liberal, kaum Feminis Radikal, dan kaum Feminis Sosialis. Tujuannya menyadarkan kaum wanita akan hak-haknya dan mereka harus menuntut emansipasi, dilakukan dengan cara menghadapi kaum laki-laki. Di Indonesia gerakan emansipasi dilakukan oleh organisasi-organisasi wanita berlandaskan pada gagasan Kartini.

Kartini menuntut pendidikan bagi kaum wanita, berarti orientasinya lebih ditekankan pada tingkatan kecerdasan secara individual. Sasaran yang lebih jauh ingin dicapai adalah mengangkat martabat kaumnya, sehingga sejajar dengan martabat kaum pria. Dengan demikian maka gerakan emansipasi yang dilakukan oleh kaum wanita Indonesia yang diartikan sebagai gerakan pembebasan kaum wanita dari ketergantungan pada orang lain, terutama pada kaum laki-laki. Tujuan gerakan itu agar wanita dapat hidup mandiri, menggunakan hak-haknya seperti halnya yang berlaku pada kaum laki-laki, sehingga mereka tidak lagi menyandang sebutan "warga negara kelas dua".

Dalam perjuangan menuntut persamaan hak antara pria dan wanita, Kartini tidak pernah mempertentangkan wanita dan kaum laki-laki. Dalam salah satu suratnya, ia mengatakan bahwa bagi kaum wanita yang menyukai kemajuan, bukan orang laki-laki yang dilawannya, melainkan pendapat kolot yang turun temurun. Bertolak dari gagasan Kartini yang menuntut pendidikan bagi kaumnya dan menyadari adanya ketidakadilan dalam perkawinan, maka Kongres Perempuan I (1928) memasukkan pendidikan untuk anak-anak perempuan dan usaha perlindungan wanita dalam perkawinan sebagai program perjuangannya. Yang disebut terakhir itu membutuhkan perjuangan yang ulet dan hasilnya baru dapat tercapai setengah abad kemudian dengan diterimanya Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Sejarah Pergerakan Nasional disebutkan bahwa dalam usaha mencapai kemerdekaan negara dan bangsanya kaum wanita melakukan kerja sama dengan kaum pria. prinsip kerja sama itu tetap dipegang dan dapat dibuktikan pada waktu perang Kemerdekaan dan pada masa Pembangunan Nasional. Tahun 1978 merupakan tonggak sejarah yang penting bagi peningkatan peranan wanita. pertama, karena pada tahun itu peranan dan status sosial wanita secara eksplisit mendapatkan pengakuan konstitusional dalam GBHN. Kedua, pada tahun itu pertama kalinya pemerintah meletakkan suatu perlengkapan nasional yang bertanggung jawab meningkatkan peranan wanita dalam Pembangunan dengan titik pusat Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Pada tahun 1983 status Menteri Muda itu ditingkatkan menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW). Tugas pokok MENUPW adalah menangani peningkatan peranan wanita dalam bidang (Tjokrowinoto, 1988).

Kegiatan wanita di dunia internasional dapat disimak pada partisipasinya dalam berbagai macam konferensi atau seminar di negara-negara Asia dan konferensi Wanita Sedunia, sebagai puncak dari Tahun Wanita internasional. konferensi ini dilangsungkan di Mexico City pada tahun 1975, berikutnya di Kopenhagen, Denmark (1980), dan di Nairobi, Kenya (1985). Pemerintah Indonesia, sebagai anggota PBB, mengirim utusan konferensi-konferensi tersebut, akan tetapi disampingnya juga datang utusan-utusan wanita, terutama dari kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang menghadiri pertemuan Non Governmental Organization (NGO). Ternyata utusan wanita yang menghadiri pertemuan NGO banyak membantu utusan-utusan resmi yang dikirim oleh pemerintah.

Bagi lapisan tipis bagi masyarakat, yang umumnya terjadi atas golongan menengah, emansipasi dinilai sudah mendekati kenyataan, tetapi bagi sejumlah besar wanita di luar golongan tersebut, emansipasi masih merupakan suatu harapan. Dalam hal meningkatkan pendidikan bagi wanita-wanita yang memerlukan uluran tangan itu, MENCUPW telah banyak berbuat. Disamping itu bantuan para wanita yang melakukan kerja sosial tidak dapat diabaikan. Lahirnya Lembaga Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang cepat merata tumbuh dan berkembang di desa-desa di seluruh tanah air berarti bahwa wanita-wanita desa sudah dilibatkan secara fisik dalam proses pembangunan bangsa. Suatu kenyataan yang sulit disangkal bahwa wanita adalah pendukung berhasilnya program pemerintah keluarga Berencana (KB). Namun PKK masih perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga pendidikan yang diberikan kepada wanita-wanita itu tidak hanya meliputi bidang fisik saja, tetapi juga mencakup bidang mental.

Dalam masa transisi menuju ke masyarakat industrial terdapat perubahan sistem nilai. Hal ini erat hubungannya dengan pembangunan yang mendatangkan teknologi Barat bersama dengan penasihat-nasihatnya. Dari teknologi Barat ini manfaat yang diambil cukup besar, tetapi disamping itu terdapat pula dampaknya, berupa benturan-benturan antara kebudayaan tradisional dan Barat. Pertemuan antar kebudayaan secara mendadak itu menimbulkan permasalahan sosial yang erat hubungannya dengan moralitas. Partisipasi wanita dalam menangani masalah ini sangat diharapkan karena hal ini sesuai dengan ketentuan tentang peranan wanita dalam GBHN 1988. Ketentuan itu menerangkan bahwa peranan wanita adalah mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, termasuk pengembangan generasi muda, terutama anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

III. Kesimpulan

Sebagai penutup ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat dikatakan bahwa perkembangan status dan peranan wanita bersifat universal, dengan catatan bahwa perpindahan dari periode Wanita Pasif ke periode Wanita Aktif tidak bersamaan waktunya.
2. Sampai pada zaman modern, keuangan pria terhadap wanita, yang sebenarnya perasaan itu bergantung pada inferioritas wanita, masih tetap berlaku.
3. Untuk membebaskan wanita dari ketergantungan pada orang lain terutama kaum laki-laki, pergerakan wanita yang melaksanakan gerakan emansipasi memegang peranan yang sangat menonjol.
4. Oleh karena perjuangan wanita sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang bersumber pada gagasan Kartini, yang menitikberatkan pada pendidikan untuk kaum wanita, maka perjuangan wanita di Indonesia tidak mempertentangkan laki-laki dan wanita.

5. Mengenai masalah wanita Indonesia sebagai pemimpin masa depan dapat dijawab dengan nada positif, bahwa hal itu mungkin dicapai bila wanita bersedia bekerja keras untuk mengejar ketinggalannya dari kaum laki-laki. Akan tetapi mengingat secara biologis wanita karier, yang juga seorang ibu rumah tangga, sulit melepaskan citra "keibuan"-nya, maka jawaban yang sifatnya pesimistis ikut menyertainya.
6. Sudah saatnya bagi keluarga yang berwawasan maju untuk mengubah manajemen keluarga yang tradisional menjadi manajemen berdasarkan kebersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowman, Henry A., 1954. *Marriage for Moderns*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Elias, Norbert, 1982. *Het Civilisatieproces, I*, (terj. Het Spectrum B.V. dari buku asli: *Ueber den Prozess der Zivilisation*). Utrecht Spectrum.
- Kartini, 1979. *Surat-surat Kartini* (Terj. Sulastin Sutrisno dari buku asli: *Door Duisternis tot Licht*, cet. IV). Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Lucas, J. Henry, 1953. *A Short History of Civilization* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Marshall, Rosalind K., 1983. *Virgins and Viragos. A History of Women in Scotland from 1080 to 1980*. London: William Collins Sons & Co. Ltd.
- Montagu, Ashley, 1971. *The Natural Superiority of Women*. New York.
- Naisbitt, John & Aburdene, Patricia 1990. *Megatrends 2000. Sepuluh Arah Baru Untuk Tahun 1990-an* (terj. Budijanto, FX dari buku asli: *Ten New Directions For The 1990's Megatrends 2000*). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Reiter, Rayna R. (ed.), 1975. *Toward an Anthropology of Women*. New York: Monthly Review Press.
- Sadli, Saparinah, 1988. "pengembangan Diri Wanita dalam Keluarga dan Lingkungan Sosial", dalam Bachtiar, Harsya W., Tan, Mely G., Sadli, Saparinah, & Sumardi, Muljanto, *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Subadio, Maria Ulfah & Ihromi, T.O., 1983. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Tan, Mely G., 1991. *Perempuan Indonesia. Pemimpin Masa Depan ?* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, Muttalib, jang Aisjah, & Sayogyo, Poedjiwati, 1988. "Analisa Situasi Wanita Indonesia". Jakarta: kantor Menteri Negara UPW.